

REPRODUKSI PENGETAHUAN UNTUK KEKUASAAN: ANALISIS WACANA KRITIS PADA ARTIKEL ILMIAH DAN PIDATO MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Achmad Ramdhany Irdiansyah

Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

e-mail: achmad.dhirdi@gmail.com

Abstrak

Pengukuhan Megawati Soekarnoputri menjadi professor kehormatan di Universitas Pertahanan Republik Indonesia menjadi perbincangan masyarakat karena baru pertama kali terjadi di Indonesia. Megawati membuat karya ilmiah berjudul "Kepemimpinan Presiden Megawati pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004" serta memberikan pidato dalam pengukuhannya sebagai Guru Besar Tidak Tetap. Kedua teks tersebut membahas masalah-masalah yang terjadi pada era kepemimpinan Megawati, kebijakan untuk mengatasi masalah, hingga mencetuskan model "kepemimpinan strategis berlandaskan Pancasila". Wacana kepemimpinan yang dibentuk Megawati menarik untuk dibahas mengingat posisi Megawati yang merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), serta ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis. Metode penelitian menggunakan analisis wacana kritis yang dicetuskan Fairclough, dimana karya ilmiah dan pidato pengukuhan Megawati ditinjau dari sisi teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Pandangan Fuchs, Habermas, dan Foucault mengenai pengetahuan dan kekuasaan digunakan untuk membantu membongkar praktik diskursif serta dampaknya pada praktik sosial. Berdasarkan hasil analisis, Megawati sedang membangun citra positif sebagai pemimpin strategis yang berpengaruh hingga masa kini. Model kepemimpinan yang digagasnya berfokus pada kemampuan pemimpin mempengaruhi orang lain dan mengindahkan peran rakyat dalam pengambilan keputusan. Pengetahuan yang dibangun adalah Pancasila, yaitu sebagai landasan bagi setiap aktivitas sosial yang justru membuat nilai-nilainya tereduksi dalam sistem pengetahuan terkontrol. Dampak yang timbul adalah kontrol negara atas individu yang semakin ketat hingga ke tataran kognitif. Ketika ditarik ke momentum pemilihan umum 2024, wacana kepemimpinan digunakan untuk membantu Megawati dan kelompoknya agar dapat kembali berkuasa.

Kata kunci: Analisis wacana kritis, Pancasila, Pengetahuan terkontrol, Wacana kepemimpinan

REPRODUCTION OF KNOWLEDGE FOR POWER: CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS ON SCIENTIFIC ARTICLES AND SPEECHES OF MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Abstract

The inauguration of Megawati Soekarnoputri as an honorary professor at the Defense University of the Republic of Indonesia has become a public conversation because this is the first time this has happened in Indonesia. Megawati wrote a scientific paper entitled "President Megawati's Leadership in the Era of Multidimensional Crisis, 2001-2004" and gave a speech in her inauguration as a Non-Permanent Professor. The two texts discuss the problems that occurred during Megawati's leadership era, policies to overcome problems, to sparking the model of "strategic leadership based on Pancasila". The leadership discourse formed by Megawati is interesting to discuss considering the position of Megawati who is the general chairman of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), as well as the chairman of the Steering Committee of the Pancasila Ideology Development Agency (BPIP) and the National Research and Innovation Agency (BRIN). This study uses a qualitative approach with a critical paradigm. The research method uses critical discourse analysis initiated by Fairclough, in which Megawati's scientific works and inaugural speech are viewed from the perspective of text, discursive practice, and social practice. The views of Fuchs, Habermas, and Foucault on knowledge and power are used to help uncover discursive practice and its impact on social practice. Based on the results

of the analysis, Megawati is building a positive image as an influential strategic leader to date. His leadership model focuses on the ability of leaders to influence others and heed the role of the people in decision making. The knowledge that is built is Pancasila, which is the basis for every social activity that reduces its values in a controlled knowledge system. The impact that arises is the control of the state over the individual which is getting tighter to the cognitive level. When drawn to the momentum of the 2024 general election, the discourse of leadership was used to help Megawati and her group return to power.

Keywords: *Controlled knowledge, critical discourse analysis, leadership discourse, Pancasila*

PENDAHULUAN

Pengukuhan Megawati Soekarnoputri menjadi Profesor Kehormatan atau Guru Besar Tidak Tetap di Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan) menjadi perbincangan masyarakat Indonesia. Kontroversi muncul lantaran ia tidak pernah menyelesaikan studi strata satu, sedangkan professor adalah jabatan yang mensyaratkan gelar akademis. Berbagai spekulasi mencuat terkait dengan pengukuhan ini. Oleh karena itu, teks media yang diproduksi oleh Megawati perlu dibongkar untuk melihat motif dibalik pengukuhan sebagai Profesor Kehormatan serta dampaknya bagi dunia akademisi Indonesia.

Megawati merupakan presiden kelima Republik Indonesia, presiden wanita pertama di Indonesia, sekaligus ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Rektor Universitas Pertahanan RI, Laksamana Madya TNI Prof. Dr. Amarulla Octavian mengumumkan akan mengukuhkan Megawati sebagai Profesor Kehormatan pada tanggal 8 Januari 2021. Rencana ini sebenarnya telah ada sejak tahun 2020 yang didasari atas tiga alasan, yaitu kemampuan kepemimpinan strategisnya selama menjadi Presiden RI, telah memenuhi persyaratan akademi dan administratif, dan diharapkan data menjadi teladan bagi masyarakat (Hakim, 2021).

Megawati menyusun karya ilmiah yang bertajuk “Kepemimpinan Presiden Megawati pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004” untuk memenuhi persyaratan mendapat gelar akademis. Dalam tulisan tersebut, ia memaparkan usaha-usaha yang dilakukannya selama menjabat sebagai presiden di era yang ia sebut sebagai “krisis multidimensi”. Krisis multidimensi merujuk pada

krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepercayaan, serta krisis keamanan nasional (Soekarnoputri, 2021). Melalui usaha-usaha tersebut, ia berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis multidimensi.

Pengukuhan Megawati memicu beragam opini di ruang publik. Sulfikar Amir, *Associate Profesor Nanyang Technological University* Singapura menyebut pengukuhan tersebut *menciderai dan mengotori proses akademik* (CNN Indonesia, 2021). Namun, rector Universitas Negeri Padang menganggap gelar tersebut layak diberikan karena telah menjalani rangkaian uji kelayakan oleh tim promotor (Rafyq, 2021). Warganet juga turut ramai membicarakan karya ilmiah Megawati yang dianggap memuji diri sendiri. Akan tetapi, Guru Besar UNJ menilai karya ilmiah tersebut menginspirasi dunia internasional (Pangestu, 2021).

Megawati bukan presiden pertama yang menulis artikel ilmiah. Presiden Amerika Serikat Barack Obama juga pernah melakukan hal serupa pada tahun 2016 dengan menerbitkan artikel berjudul “*United States Health Care Reform: Progress to Date and Next Steps*”. Artikel tersebut diterbitkan ketika ia masih berstatus presiden aktif. Berbeda dari Megawati, Obama lebih spesifik membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan reformasi kebijakan kesehatan *The Affordable Care Act* (ACA) (Obama, 2016). Artikel tersebut juga mendapat beragam kritik, terutama dalam hal penggunaan kata ganti “I” yang dapat menimbulkan bias dalam proses blind peer review.

Dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar tidak tetap, Megawati membahas kepemimpinan strategis. Kepemimpinan strategis

menurutnya dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan suatu negara. Pemimpin yang strategis tidak sekadar menyelesaikan masalah yang ada, namun juga memikirkan bagaimana supaya persoalan yang sama tidak terulang. Tolok ukur keberhasilan kepemimpinan jenis ini adalah bagaimana upaya-upaya yang dilakukan masih relevan hingga saat ini dan tanggung jawab pemimpin bagi masa depan bangsa (Soekarnoputri, 2021). Konsep kepemimpinan strategis sekilas mirip dengan gagasan Habermas mengenai tindakan strategis; keduanya sama-sama berorientasi kesuksesan.

Megawati mencetuskan sebuah model kepemimpinan baru yang ia sebut sebagai “kepemimpinan strategis berlandaskan Pancasila”. Teori-teori kepemimpinan yang telah ada sebelumnya tidak berkaitan langsung dengan ideologi. Oleh karenanya, upaya Megawati menjadikan Pancasila sebagai basis moral dari teori kepemimpinan menari untuk dikaji.

Teoris kritis mendasarkan pandangan-pandangan mereka pada epistemologi, yaitu cabang filsafat yang membahas hakikat pengetahuan; membicarakan mengenai bagaimana pengetahuan manusia dibentuk (Saidi, 2015). Pengetahuan sendiri memiliki banyak bentuk, misalnya Machlup yang membagi pengetahuan menjadi praktis, intelektual, hiburan, spiritual, dan yang tidak diinginkan, atau Habermas yang membagi pengetahuan menjadi *instrumental*, *hermeneutic*, dan *critical emancipatory*. Selain itu, ada juga Foucault yang memandang pengetahuan sebagai rezim wacana, yakni bentuk lain dari kekuasaan.

Praktik wacana (*discursive practices*) telah banyak digunakan dalam studi komunikasi politik mengenai penggunaan bahasa. Pandangan Foucault mengenai praktik wacana yang fokus pada *apa yang mendorong seseorang mengeluarkan sebuah pernyataan* ketimbang *apa maksud dari pernyataan*, yang melibatkan material dan simbol, serta menjadi jalan untuk membentuk pengetahuan (Bacchi & Bonham, 2014), merupakan alat untuk memahami bagaimana hubungan antara komunikasi yang dimediasi dan politik. Habermas mengambil posisi yang lebih

optimis karena melihat komunikasi politik di ruang publik berkontribusi pada proses legitimasi deliberatif (Habermas, 2006). Ia merujuk pada penelitian-penelitian yang membuktikan komunikasi politik sebagai mekanisme untuk meningkatkan pembelajaran bersama dan pemecahan masalah secara kolektif. Menurutnya, *political power* membutuhkan legitimasi, dimana proses legitimasi harus melalui ruang publik yang mampu memelihara opini publik yang dipertimbangkan (Habermas, 2006). Habermas di sini melihat peluang masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembuatan kebijakan melalui ruang publik yang terbuka dan inklusif, yang menerapkan *communicative action*.

Pengetahuan didefinisikan oleh Fuchs (2016) sebagai proses dialektika material, dimana manusia mengubungkan ide-ide mereka satu sama lain dan menciptakan struktur-struktur pengetahuan. Manusia sebagai makhluk sosial yang berkomunikasi satu sama lain, saling menukarkan pengetahuan yang mereka miliki. Mereka membentuk pengetahuan baru atau menggantikan pengetahuan yang dimiliki dalam proses tersebut. Sistem pengetahuan kolektif dibentuk oleh kelompok sosial, sistem sosial, dan masyarakat yang berangkat dari pengetahuan individu, lalu dikomunikasikan dengan pengetahuan kolektif. Pengetahuan kolektif merepresentasikan struktur kelas dan dominasi yang terjadi di dalam proses komunikasi tersebut. Dalam bidang politik, pengetahuan berhubungan dengan aturan dan pengaruh, mengingat pengetahuan berasal dari pemahaman politik individu dan pandangan politik kolektif. Keputusan kolektif yang menentukan kehidupan manusia dalam suatu sistem sosial dipengaruhi oleh aktor-aktor politik (Fuchs, 2016). Dengan demikian, pengetahuan politik individu dan kolektif saling mempengaruhi sehingga bersifat dialektis.

Habermas membagi paradigma pengetahuan menjadi tiga, yaitu *instrumental knowledge*, *hermeneutic knowledge*, dan *critical emancipatory knowledge*. Ia mendasari hal itu dari tiga akar organisasi sosial, yaitu kerja (*work*),

bahasa (*language*), dan kekuasaan (*power*). Menurut Fuchs (2016), pemisahan yang dilakukan Habermas memiliki beberapa persoalan teoritis, dimana bahasa dan komunikasi sering dijadikan sebagai media dan proses dari kontrol dan kekuasaan. Kekuasaan tidak melulu mengenai politik, namun juga ada dalam budaya dan ekonomi (Fuchs, 2016). Bagi Habermas, komunikasi diselewengkan oleh kepentingan. Pengetahuan bukan merupakan representasi netral dari dunia objektif, namun diwujudkan melalui bahasa, ditentukan oleh kepentingan (Chilton, 2004). Dari sini, kita bisa melihat bahwa pengetahuan tidak muncul dengan sendirinya. Pengetahuan muncul dari interaksi yang dilakukan manusia dengan lingkungannya dan sangat dipengaruhi oleh kepentingan para pembentuknya.

Seseorang yang memahami proses pembentukan pengetahuan tentu mampu menjadikan pengetahuan individunya menjadi pengetahuan kolektif melalui komunikasi. Namun, penerima pesan juga bukan subjek yang pasif, mereka mencocokkan pesan yang diterima dengan pengetahuan yang dimiliki sebelum mengafirmasi pesan tersebut menjadi pengetahuan baru. Demikian yang membuat pengetahuan bisa menjadi ideologi, karena realitas didistorsi dalam representasi simbolik untuk menjustifikasi kekuasaan sekelompok atau seseorang. Pengetahuan sebagai ideologi bersifat memaksa, namun dominasi terlihat seperti muncul dengan sendirinya (Fuchs, 2016). Hal ini juga menjelaskan mengapa para propagandis mencocokkan antara pesan dengan pengetahuan kolektif yang telah ada supaya lebih mudah diterima oleh penerima pesannya.

Habermas (1979) mencetuskan konsep pragmatik universal (*universal pragmatics*) untuk mengidentifikasi dan membangun kondisi-kondisi umum dari kemungkinan pemahaman. Terdapat kondisi-kondisi yang memungkinkan penerima pesan memahami pesan yang dikirimkan dengan benar, seperti mengucapkan sesuatu yang dapat dipahami, memberikan sesuatu untuk dimengerti, membuat dirinya dapat dimengerti, dan mencapai pemahaman dengan orang lain. Dari situ ia

berpandangan bahwa tujuan memahami satu sama lain adalah mencapai kesepakatan yang berdasarkan pemahaman resiprokal bersama, kepercayaan bersama, dan saling sesuai satu sama lain. Sebuah kalimat digunakan untuk merepresentasikan sesuai di dunia, untuk menunjukkan maksud dari pembicara, dan untuk membangun relasi antarpribadi yang terlegitimasi (Jurgen Habermas, 1979).

Pengetahuan dipandang Foucault sebagai sebuah rezim wacana. Pengetahuan tidak berevolusi, namun hanya bergeser dari satu bentuk pengetahuan ke bentuk pengetahuan lainnya dan sifatnya otoritatif. Rezim wacana ia anggap sebagai bentuk dari kekuasaan, karena memiliki otonomi dan klaim atas kebenaran dan kontekstualisasi sebuah pengetahuan. Klaim kebenaran tersebut adalah bentuk operasi kekuasaan, dimana wacana mempengaruhi berbagai institusi dan praktik sosial. Wujud kekuasaan menjadi tidak tampak. Orang-orang tidak sadar bahwa ada kekuasaan yang bekerja, namun baru akan terasa ketika dampaknya mulai terlihat (Mudhoffir, 2013).

Foucault membahas soal politik dan alasan di baliknya. Ia melihat hubungan antara rasionalitas dengan politik dengan jelas, bahwa rasionalitas yang mendorong terbentuknya struktur kekuasaan. *Reason of state* atau alasan suatu negara dibentuk, dianggap oleh Foucault sebagai seni. *Reason of state* kemudian dipahami sebagai *rational government* yang mampu meningkatkan kekuatan negara sesuai dengan pengandaianya membentuk tipe pengetahuan tertentu. Pemerintah akan terwujud apabila kekuatan negara telah diketahui. Foucault juga menyinggung soal politisi yang memiliki tugas “mengikat”—mengikat perbedaan kebijakan, mengikat tensi politik yang berbeda—menggunakan “*shuttle*” opini populer. Dalam kajian tentang kekuasaan, ia menganggap kekuasaan sebagai suatu jenis relasi antara orang-orang. Karakteristik dari kekuasaan adalah seseorang mampu menentukan perilaku orang lain (Michel Foucault, 1988).

Kekuasaan Foucault pandang sebagai sesuatu yang positif dan produktif, di mana semua orang memiliki kekuasaan masing-masing

bergantung pada relasi yang dimilikinya. Kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai otoritas berskala besar berbasis kedaulatan (*sovereign power*), namun menjadi *disciplinary power* yang bekerja dalam dan terhadap setiap relasi sosial, ekonomi, keluarga, dan seksualitas. Kekuasaan tidak terpusat, ia tersebar dan ada di dalam setiap relasi manusia. Pengetahuan juga memiliki relasi dengan kekuasaan, yang mana hal tersebut dapat berdampak pada tubuh individu melalui suatu bentuk kontrol sosial (Mudhoffir, 2013).

Kekuasaan yang bekerja saat ini adalah *disciplinary power* yang bertujuan untuk “mendisiplinkan tubuh” dan “membuat tubuh yang patuh dan berguna”. Konsep tersebut berkembang menjadi *governmentality*, yakni mentalitas untuk mengatur populasi. Negara mengatur perilaku masyarakat dengan menginternalisasi penundukan agar mereka menjadi populasi yang patuh. Negara mempraktikkan *governmentality* dengan cara-cara kekerasan dan konsensual dalam relasi sosial individu. Relasi kekuasaan yang ada dalam setiap relasi sosial tertanam pengaruh kepentingan-kepentingan negara (Mudhoffir, 2013). Praktik seperti ini lazim dalam iklim demokrasi. Orang-orang diberikan banyak pilihan dalam pemilihan umum, namun banyak dari mereka yang dikuasai oleh seorang atau sekelompok melalui relasi sosialnya. Tidak tampak upaya dominasi, karena kekuasaan telah dirasionalisasi sehingga terlihat seperti kebebasan. Masyarakat seperti diberikan ilusi kebebasan, mereka tidak benar-benar memiliki pilihan untuk lepas dari kontrol negara.

Foucault juga menyoroti bagaimana pengetahuan harus dimanfaatkan oleh para intelektual untuk memperjuangkan kelompok yang selama ini tertindas dalam sistem dan ideologi yang beroperasi. Para intelek harus menyuarakan kebenaran kepada mereka yang belum melihatnya, atas nama orang-orang yang dilarang untuk menyuarakan kebenaran. Peran para intelektual adalah berjuang melawan bentuk-bentuk kekuasaan yang mengubah mereka menjadi objek dan instrumen dalam ruang pengetahuan, kebenaran, kesadaran, dan wacana. Massa pada dasarnya telah memiliki pengetahuan sendiri,

namun sistem kekuasaan memblokir, melarang, dan tidak memvalidasi wacana dan pengetahuan tersebut—kekuasaan kini meliputi seluruh jaringan sosial (Foucault & Deleuze, 1977).

Habermas membagi dua jenis tindakan, yaitu tindakan strategis dan tindakan komunikatif. Perbedaan mendasar keduanya terletak pada orientasi tindakan, dimana tindakan strategis berorientasi sukses sedangkan tindakan komunikatif berorientasi mencapai pemahaman. Sukses di sini dinilai dari keadaan yang sengaja dihasilkan oleh intervensi, sedangkan mencapai pemahaman dinilai dari kesepakatan antara komunikator. Setiap tipe tindakan juga terikat dengan karakteristik klaim validitas yang dapat dikritik, dibela, dan mana yang berpotensi rasional. Klaim validitas menurut Habermas (1979) dapat dicapai ketika penerima pesan mengakui struktur simbolik dari pesan, yaitu mengakui kalimat adalah harfiah (*undersandability*), pernyataan tersebut benar (*truth*), ekspresi kejujuran (*sincerity*), dan ketepatan ucapan (*rightness*). Konsep ini berikatan dengan dunia sosial dan dunia objektif yang bersama membentuk ruang publik, dan dunia subyektif yang membentuk ruang pribadi. Kebenaran rasional secara logis akan tercapai jika klaim validitas dapat diuji secara bebas (Chilton, 2004).

Tindakan strategis adalah tindakan berbasis kesuksesan dengan mempengaruhi keputusan orang lain. Habermas bersikeras bahwa tindakan ini hanya berorientasi pada dunia objektif dari keadaan yang ada atau potensial. Aktor strategis fokus utamanya adalah pada hasil yang mereka inginkan. Ia menganggap orang lain sama-sama rasional dan berorientasi pada tujuan orang-orang paham bahwa mengejar rencana individu juga membutuhkan bantuan orang lain, itu sebabnya mereka butuh berpikir secara strategis. Meskipun mereka memasukkan ketergantungan strategis dalam rencananya, tidak berarti tindakan yang mereka ambil bersifat sosial (Johnson, 1991).

Tujuan tindakan strategis pada dasarnya adalah keuntungan bagi diri sendiri, ia tidak benar-benar memikirkan orang lain. Strategi memiliki tiga fungsi menurut Chilton (2004), yaitu koersi

yang membuat ucapan memiliki kekuatan tertentu, legitimasi dan delegitimasi yang mendorong orang-orang untuk menuruti atau melawan ucapan seseorang, serta representasi dan misrepresentasi yang mengontrol pengetahuan orang-orang melalui kontrol informasi. Ketiganya saling berhubungan dalam praktiknya. Legitimasi bisa diakusisi dengan menunjukkan citra yang positif melalui memuji diri sendiri, menjelaskan diri sendiri, mengidentifikasi diri sebagai sumber kekuasaan, dan lain sebagainya. Sedangkan, delegitimasi bisa dibangun melalui tindakan-tindakan seperti menyalahkan, mengkambinghitamkan, mengasingkan, menyerang karakter seseorang atau sekelompok, menyerang kerja sama komunikasi orang lain, dan lain sebagainya (Chilton, 2004).

Reunanen & Kunelius (2019) menjelaskan bagaimana komunikasi politik dapat mengubah *communicative power* menjadi *political power*. Mereka berangkat dari gagasan Habermas mengenai komunikasi politik dalam masyarakat media. Akan tetapi, mereka memandang bahwa diskusi politik sebenarnya didominasi oleh tindakan strategis dimana klaim validitas diabaikan, dibungkam, atau dilebih-lebihkan ketika aktor berorientasi pada kesuksesan. *Communicative power* sendiri dipahami sebagai bagian komunikatif dari pengaruh/kekuatan politik yang terjalin dengan bagian strategis dari pengaruh/kekuatan politik. *Communicative power* akhirnya dilihat sebagai cara aktor politik dalam menghadapi resistensi kritis dan rasional dari orang-orang yang berusaha mereka yakini. Lalu, media berfungsi sebagai arenanya. Pengaruh yang diciptakan dalam ruang publik dapat berubah menjadi *political power* dalam *policy networks* (kumpulan aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan) (Reunanen & Kunelius, 2019).

Orang-orang atau kelompok memiliki perasaan khawatir akan penguasaan oleh orang lain terus muncul. Itu sebabnya mereka melakukan langkah strategis, agar tujuan pribadi mereka dapat tercapai lebih dahulu—mempertahankan kekuasaan ataupun kedaulatan atas diri sendiri. Dalam komunikasi politik, para politisi menggunakan cara-cara tersebut untuk membuat

mereka tampak berkuasa sehingga dapat diakui berkuasa oleh masyarakat.

Meskipun teori kepemimpinan strategis berlandaskan Pancasila menjadi gebrakan baru di dunia akademis, perlu diingat bahwa ia sebenarnya adalah seorang politisi. Megawati merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang saat ini memimpin parlemen dan eksekutif. Oleh karenanya, teori tersebut tidak bisa diterima secara mentah-mentah, terutama karena adanya ideologi yang melekat secara eksplisit dalam teori yang dibangun. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar dimensi kekuasaan yang ada di balik wacana yang dibangun Megawati dalam karya ilmiah dan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Tidak Tetap Unhan. Dengan membongkar kedua teks tersebut, motif dan tujuan Megawati menggunakan istilah Pancasila dalam diseminasi ilmiahnya dapat terlihat, serta implikasinya terhadap dunia akademis.

Wacana kepemimpinan yang dibangun oleh Megawati Soekarnoputri merupakan suatu bentuk reproduksi pengetahuan. Teori kepemimpinan strategis telah banyak dikembangkan sebelumnya, lalu direproduksi dengan menambahkan unsur-unsur dari Pancasila sehingga menghasilkan teori kepemimpinan strategis berlandaskan Pancasila. Megawati selama ini dikenal sebagai *kingmaker* dalam politik Indonesia. Dengan menganalisis wacana yang ia bangun, kita dapat memahami pengetahuan apa yang ingin ditanamkannya pada masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis (AWC) yang disusun oleh Fairclough (2003) dipilih karena ia bias berpihak pada kelompok yang tertindas. Untuk melihat hubungan antara wacana dengan ideologi, dampak semiosis dari teks, serta hubungan antara teks dengan kekuasaan, dominasi, perjuangan dan resistensi akan dieksplor dengan analisis sosial (Fairclough,

2006). Tiga cakupan analisis wacana kritis ini adalah teks, praktik diskursif (produksi dan konsumsi teks), dan praktik sosial, dengan menarik nilai-nilai yang ada di dalam setiap hal (Munfarida, 2014). Dengan menganalisis ketiga hal tersebut, kita bisa melihat relasi kuasa yang ada di balik wacana yang disampaikan Megawati dalam artikel ilmiah dan pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Tidak Tetap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Megawati membahas metode kepemimpinan yang ia gunakan ketika menjabat sebagai presiden Indonesia dalam karya ilmiah dan pidato pengukuhannya. Karya ilmiah berjudul “Kepemimpinan Presiden Megawati pada Era Kiris Multidimensi, 2001-2004” membahas masalah apa saja yang terjadi di Indonesia pada rentang tersebut dan kebijakan-kebijakan yang diambil presiden saat itu untuk menyelesaikan dan mencegah masalah tersebut terulang kembali. Dalam pidato pengukuhannya, Megawati membahas mengenai kepemimpinan strategis, konsep yang menjadi landasan karya ilmiahnya untuk menjelaskan bagaimana cara ia memimpin sewaktu menjabat. Dalam pidato tersebut, ia lebih banyak membahas karakteristik kepemimpinan strategis serta cara ia menerapkannya dahulu. Gagasan kepemimpinan strategis berlandaskan Pancasila muncul untuk mengkontekstualisasi teori-teori kepemimpinan strategis yang sudah ada dengan kondisi sosial-budaya Indonesia. Tabel 1 menunjukkan hasil analisis dari teks yang dibuat oleh Megawati berdasarkan tiga tingkat analisis wacana kritis.

Kepemimpinan strategis menurut Davies dan Davies (2004) merupakan elemen strategis dalam paradigma kepemimpinan yang lebih luas. Kepemimpinan strategis bukanlah suatu jenis kepemimpinan baru, namun lebih kepada bagaimana seorang pemimpin melihat persoalan dari berbagai perspektif sehingga mampu memberikan arahan yang lebih efektif bagi organisasinya. Keberhasilan kepemimpinan strategis ditentukan oleh kemampuan organisasi dan karakteristik individu (Davies & Davies, 2004).

Strategi dalam pandangan Davies & Davies berkaitan erat dengan *direction setting*, dipandang sebagai cara pandang holistik atas permasalahan agar dapat diselesaikan secara paripurna. Sedangkan bagi Habermas, strategi dipandang sebagai upaya mencapai tujuan dengan cara mempengaruhi orang lain. Keduanya sama-sama menekankan aspek pengaruh pemimpin, namun Habermas memandang secara negatif karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip pragmatik universal.

Megawati menggunakan pendekatan keamanan nasional untuk menjelaskan masalah-masalah yang dihadapinya ketika menjadi presiden Indonesia. Lima bidang menjadi objek kajian, yaitu ekonomi, politik, sosial, lingkungan, dan militer. Pemilihan lima objek kajian (ekonomi, politik, sosial, lingkungan, dan militer) dimaknai sebagai usaha Megawati menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa secara komprehensif. Pemilihan tersebut juga menunjukkan praktik *governmentality* yang dilakukan oleh Megawati. Megawati melahirkan berbagai kebijakan guna mengendalikan sumber daya yang ada dalam negara, karena ia merasa bertanggung jawab menghadirkan keadilan sosial. Dari sisi komunikasi politik, penulisan karya ilmiah adalah upaya Megawati meraih kembali legitimasi sebagai pemimpin bangsa dari masyarakat. Megawati sama sekali tidak menyebutkan kekurangannya dalam karya ilmiah maupun pidatonya.

Pada pembahasan ekonomi, fokus utamanya adalah “*membangun kembali ekonomi yang porak-poranda sejak 1998 hingga 2001*”. Pemilihan frasa “porak-poranda” bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang kacau balau tidak beraturan. Ekonomi diunggulkan oleh Megawati, mengingat diskursus reformasi selama ini sangat menyoroti krisis ekonomi yang terjadi. Kebijakan privatisasi BUMN yang hingga saat ini masih menjadi kontroversi turut dibahas untuk menunjukkan rasionalisasi pengambilan kebijakan tersebut. Kebijakan tersebut memang menuai pro kontra karena di anggap menjual aset negara pada pihak asing, namun di sisi lain dibutuhkan efisiensi untuk menutup defisit anggaran (Ma’arif, 2019). Megawati dalam hal ini sedang melakukan *counter*

argument atas narasi yang berkembang bahwa dirinya adalah “tukang jual aset negara”, bahkan banyak dijadikan *meme* oleh pengguna internet (Muzir, 2015). Untuk menguatkan argumen bahwa

dirinya berhasil membangun kembali ekonomi Indonesia, dicantumkan pernyataan dari lima menteri dari kabinet Gotong Royong.

Tabel 1. Hasil Analisis Teks Media

Tingkat/ Bagian	Teks (mikro)	Praktik Diskursif (meso)	Praktik Sosial (makro)
Kepemimpinan Strategis	Gambaran bagaimana pemimpin strategis bekerja	Megawati menginspirasi presiden-presiden selanjutnya dalam membuat kebijakan	Klaim Megawati sebagai pemimpin yang strategis.
Ekonomi	Gambaran keadaan ekonomi pra-Megawati yang tidak beraturan	Krisis ekonomi pada era pemerintahan Megawati.	Bentuk <i>counter argument</i> atas narasi yang menyalahkan Megawati atas krisis ekonomi pada masa pemerintahannya.
Politik	Gambaran keberhasilan memperbaiki demokrasi dan menanggulangi terorisme.	Upaya penanganan konflik yang melanggar hak-hak sipil.	
Sosial	Gambaran penanggulangan masalah kemiskinan akibat krisis moneter.	Tata kelola utang luar negeri tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan.	Wujud kontrol negara atas kehidupan sosial masyarakat.
Lingkungan	Gambaran kebijakan tegas pada usaha sektor tambang dan usaha penghijauan oleh pemerintahan Megawati.	Penguasaan alam oleh negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan individu/kelompok tertentu.	Rasionalisasi atas pentingnya negara sebagai institusi pengelola sumber daya.
Militer	Gambaran reformasi TNI/Polri sebagai upaya menstabilkan situasi pasca reformasi.	Dorongan purnawirawan TNI/Polri untuk terjun ke dunia politik, kompensasi atas larangan anggota militer aktif menduduki jabatan sipil.	Menegaskan jasa Megawati dalam menyejahterahkan keluarga TNI/Polri meskipun berasal dari kalangan sipil.
Pancasila	Gambaran Pancasila sebagai landasan filosofis dari kepemimpinan strategis.	Penafsiran Pancasila menyesuaikan kepentingan rezim penguasa.	Rasionalisasi atas pengerahan para intelektual untuk kepentingan ekonomi (UU Cipta Kerja).

Sumber : Olahan Peneliti (2021)

Megawati menunjukkan usahanya melaksanakan amandemen UUD 1945 dengan menetapkan aturan-aturan mengenai pemilihan umum dan kelembagaan negara. Ia mengutip peneliti yang menyebut pemerintahannya memiliki *sense of urgency* dan *sense of crisis*. Lalu, Megawati menunjukkan keberhasilannya menyelesaikan berbagai konflik terorisme dan separatisme. Megawati sedang membangun persepsi bahwa dirinya sangat menjunjung tinggi demokrasi dan menaruh perhatian tinggi pada seluruh wilayah yang berkonflik. Akan tetapi, di balik kebijakan penanggulangan terorisme tersebut, terdapat banyak protes yang diberikan oleh umat Islam akibat tindakan Polisi dan Densus 88 yang banyak melanggar ketentuan undang-undang dan HAM. Penanganan konflik lebih banyak merugikan hak-hak masyarakat sipil, misalnya penculikan aktivis-aktivis muslim yang terjadi di berbagai provinsi yang disertai dengan penyiksaan demi mendapatkan keterangan. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajukan uji material terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai melanggar konstitusi (Thoiyibi, 2008).

Kebijakan untuk menanggulangi masalah kemiskinan akibat krisis moneter juga dicantumkan untuk menunjukkan dirinya sebagai harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Akan tetapi, penelitian hubungan antara utang luar dengan kemiskinan menunjukkan bahwa tata kelola utang era Megawati tidak berdampak nyata pada pengentasan kemiskinan, tidak lebih baik dari usaha Soeharto dan Habibie dahulu. Utang luar negeri justru cenderung menurunkan tingkat kesejahteraan (Junaedi, 2018). Bila dipandang dari perspektif *governmentality*, tindakan-tindakan yang dilakukan Megawati dalam politik dan sosial adalah wujud kontrol negara atas kehidupan sosial. Negara memaksa masyarakat yang memberontak untuk tunduk pada rezim berkuasa dengan pendekatan keamanan, menciptakan kesenjangan relasi kuasa antara keduanya. Termasuk juga upaya pengentasan kemiskinan yang pada dasarnya dilakukan untuk

meredam usaha mendelegitimasi pemerintah dan membawa masyarakat kembali tunduk kepada negara.

Dalam pembahasan lingkungan, Megawati membahas kebijakan tegasnya pada sektor usaha tambang dan gerakan penghijauan yang diinisiasinya. Dalam pidatonya, ia membahas fokusnya pada lingkungan sebagai bagian dari aspek geopolitik. Ia membicarakan krisis iklim yang terjadi di dunia dan dampaknya bagi Indonesia. Ia menyoroti praktik perusakan lingkungan dan eksploitasi alam berlebih yang terjadi di Indonesia. Lalu, ia menegaskan bahwa kepemimpinan strategis harus memikirkan pula keberlangsungan bumi. Lingkungan hidup dipandang berkaitan erat dengan ekonomi, sosial, dan keamanan nasional sehingga pemimpin tidak boleh mengabaikan hal ini. Megawati dalam hal ini sedang memberikan rasionalisasi atas pentingnya keberadaan negara sebagai institusi yang mengelola sumber daya. Geopolitik dinilai sebagai kekuatan sebuah negara sehingga lingkungan harus dijaga supaya dapat memberikan kekuatan kepada pemimpin dalam mengendalikan negara. Akan tetapi, penguasaan alam oleh negara juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok yang menginginkan keadilan sosial.

Pada bagian militer, Megawati fokus membahas reformasi TNI/Polri yang dilakukannya sebagai usaha menciptakan stabilitas pasca reformasi. Di bagian ini, ia banyak mengungkit perhatian tingginya pada TNI/Polri seperti usaha meningkatkan kesejahteraan para anggota dan mendorong purnawirawan masuk ke dunia politik. Megawati ingin menunjukkan kepedulian dirinya terhadap pasukan keamanan meskipun dirinya berasal dari kalangan sipil. Sepanjang kepemimpinannya, Megawati memang tidak banyak mencampuri urusan pengelolaan internal militer. Ia juga tidak terburu-buru merespon desakan untuk mempercepat reformasi militer dari kelompok masyarakat sipil. Hubungan antara warga sipil dan militer menegang seiring berkembang persepsi ancaman internal sehingga pendekatan militer digunakan dalam menanggulangi ancaman-ancaman tersebut (Haripin, 2019). Ia juga ingin

menegaskan bahwa dirinya berperan penting bagi suksesnya keluarga TNI/Polri di dunia sipil. Ia ingin mengirimkan pesan kepada mereka supaya tidak melupakan jasanya dahulu. Hal ini bisa juga dimaknai sebagai bentuk ajakannya kepada keluarga TNI/Polri agar merapatkan diri ke barisannya. Apa yang dilakukan Megawati ini justru jauh dari semangat netralitas TNI/Polri. Penggunaan jabatan purnawirawan TNI/Polri dalam dunia sipil menciptakan kesenjangan relasi kuasa dengan masyarakat sipil.

Megawati menyebutkan badan-badan yang dibentuk pada era pemerintahannya yang hingga kini berperan penting dalam penyelenggaraan negara. Badan-badan tersebut di antaranya adalah Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (sekarang KPAI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi (MK), dan lain sebagainya. Pada bagian ini, ia ingin menunjukkan bahwa dampak dari kepemimpinannya masih terasa hingga saat ini. Dalam kesimpulan akhirnya, ia menegaskan bahwa kepemimpinan dirinya yang menyebabkan Indonesia berhasil keluar dari krisis multidimensi.

Dalam pidato yang diberikan Megawati, ia memuji keputusan Presiden Jokowi yang mengintegrasikan seluruh badan penelitian ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Megawati ingin menunjukkan bahwa kepemimpinan strategisnya menginspirasi kepemimpinan-kepemimpinan setelahnya. Pernyataan ini juga menepis anggapan masyarakat bahwa dirinya mengendalikan Jokowi di belakang layar. Dalam pemilihan presiden tahun 2014, banyak berkembang narasi bahwa Joko Widodo merupakan “capres boneka”. Boneka sendiri bermakna “alat permainan” yang dalam konteks ini Joko Widodo merupakan “boneka” PDIP, yang berarti dikendalikan oleh Megawati (Hasfi, Santosa, & Lukmantoro, 2015). Masyarakat kini fokus pada jabatannya di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan BRIN yang secara teknis di bawah presiden, menyiratkan kekuasaan Presiden berada di atas kekuasaan Megawati. Banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa kedua lembaga tersebut bermaksud mengendalikan pengetahuan

masyarakat melalui saluran pendidikan. Hal ini menunjukkan upaya kontrol yang ingin Megawati lakukan atas sistem pengetahuan setiap warga negara. Tujuannya adalah agar masyarakat tidak terbesit untuk melakukan pemberontakan.

Megawati memandang pemimpin strategis membutuhkan visi yang jelas ke depan, memiliki wawasan geopolitik, dan berfokus pada keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Seorang pemimpin harus memiliki, *sense of direction* atau keyakinan atas arah tujuan visi yang akan dicapai, dan *sense of discovery* untuk membantu menemukan gagasan terobosan. Pada bagian pembukaan, ia menyatakan ukuran bagi kepemimpinan strategis yang mencakup tiga rentang waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan.

“Kepemimpinan strategis tidak hanya diukur dari keberhasilan di masa lalu, namun juga harus berkolerasi dengan masa kini, dan juga harus melekat dengan tanggung jawab pemimpin bagi masa depan” (Soekarnoputri, 2021).

Pemilihan diksi “keberhasilan” menunjukkan fokus analisis pada keberhasilan. Penyebutan tiga rentang waktu menunjukkan dimensi strategis yang fokus pada tindakan jangka panjang. Pernyataan ini memberikan konteks keterkaitan antara karya ilmiah yang ditulis dengan pidato yang akan diucapkan. Pada bagian penutup, ia menyatakan bahwa tugas pemimpin strategis adalah memotivasi masyarakat.

“Tugas dan peran kepemimpinan strategis yang menggerakkan gelora semangat bagaikan “api yang tak kunjung padam”” (Soekarnoputri, 2021).

Ungkapan “api yang tak kunjung padam” bermakna semangat yang hidup selamanya. Peribahasa ini menunjukkan bagaimana pemimpin strategis harus mampu mendorong bangsa supaya selalu semangat dalam mencapai tujuannya. Peribahasa ini juga digunakan untuk menggambarkan Megawati sebagai sosok yang “tak kunjung padam”, maksudnya adalah selalu bersemangat membangun bangsa.

Megawati melihat tiga perubahan besar yang mendisrupsi manusia, yakni perubahan tataran kosmik (ilmu pengetahuan), revolusi genetika, dan kemajuan teknologi realitas virtual. Ia menyorot bagaimana perubahan-perubahan tersebut akan mempengaruhi manusia secara negatif apabila tidak memiliki landasan kemanusiaan. Reformasi yang terjadi di Indonesia tidak melahirkan pemikir-pemikir yang mampu menawarkan solusi ketika terjadi reformasi kembali. Indonesia hingga saat ia memimpin tidak memiliki *roadmap* yang jelas dan berkelanjutan. Itulah yang mendasarinya mempraktikkan kepemimpinan strategis yang berlandaskan Pancasila. Peran ideologi di sini adalah untuk memberi wawasan filsafat dasar haluan negara dan cara bangsa Indonesia memandang dunia.

Dalam pernyataan penutup, Megawati mengatakan kepemimpinan strategis perlu memuat aspek ideologis, teknokratik, dan karakter. Pancasila dijadikan pegangan bagi keberlangsungan bangsa Indonesia.

“Bonus demografi, sumber daya hayati dan alam, sangat-sangat-sangat membutuhkan kepemimpinan strategis yang memuat aspek ideologis, kepemimpinan teknokratik, dan kepemimpinan berkarakter yang membangun legitimasi bagi konsolidasi seluruh kekuatan nasional” (Soekarnoputri, 2021).

“Sehebat-hebatnya disrupsi dan krisis yang terjadi, yakin, haqqul yaqin, selama bangsa Indonesia punya pegangan Pancasila, kita bisa melewati berbagai ujian sejarah hal tersebut” (Soekarnoputri, 2021).

Megawati menggunakan ungkapan *sangat-sangat* dan *haqqul yaqin* untuk menegaskan pernyataannya. Majas alonim dan majas tautologi digunakan agar publik mengikuti keyakinan yang diungkapkan oleh Megawati tersebut. Kalimat-kalimat tersebut juga memberi contoh bagaimana pemimpin strategis harus memiliki *sense of direction* yang dimulai dari diri sendiri. Tujuan utamanya hanya satu, yakni menggambarkan

Megawati sebagai pemimpin yang strategis. Akan tetapi, usaha tersebut justru menjauhkan dirinya dari esensi demokrasi, agak terbalik dari citranya yang demokratis (Supriadi, 2018).

Demokrasi seharusnya membuka ruang bagi masyarakat untuk bisa bersuara bebas dan negara berperan sebagai pelayan bagi rakyat. Namun, metode kepemimpinan Megawati justru menitikberatkan kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan demokratis sepatutnya berlandaskan pada kesepakatan umum yang dalam hal ini dapat dicapai melalui dewan perwakilan rakyat. Namun, Megawati justru menganggap dinamika parlemen menghambat usahanya. Presiden ditempatkan sebagai pusat dari negara. Rakyat ditempatkan sebagai objek perintah sehingga partisipasi mereka luput dari pencakupan wacana ini.

Dalam materi pidatonya, Megawati mendasari gagasan-gagasan yang diutarakannya dengan Pancasila. Pancasila menurut Megawati harus dimasukkan dalam perasaan setiap warga negara. Ia merasa masyarakat Indonesia harus dibangkitkan kembali *roso*-nya. *Roso* merujuk pada istilah tradisional Jawa yang berarti rasa. Rasa di sini berhubungan dengan kemampuan kognitif seseorang untuk mendapat pengetahuan, dalam spiritual Jawa lebih diutamakan ketimbang rasionalitas. Rasa lebih mengedepankan batin ketimbang pikiran, melatih kepekaan terhadap sesuatu yang di luar nalar pikiran manusia (Sa'adah, 2020).

Upaya menghidupkan Pancasila di dalam *roso* setiap warga negara adalah bagian dari menjaga Pancasila agar dapat tetap relevan bagi masyarakat. Namun, *roso* yang sifatnya irasional kontraproduktif dengan prinsip Pancasila yang rasional dan terbuka. Pancasila yang masuk ke dalam rasa membuatnya menjadi dinamis. Akan tetapi, secara nilai dasar manusia pada umumnya telah menerapkan Pancasila dalam kehidupannya karena ia merupakan ekspresi fitrah manusia. Adanya label Pancasila justru membuatnya menjadi sakral, dalam artian menjadi pengetahuan yang statis dan anti-kritik. Praktik seperti itu

digunakan oleh Orde Baru untuk mengontrol masyarakat—menetapkan standar penafsiran tertentu untuk menciptakan keseragaman persepsi dan pengetahuan (Sukoco, 2017).

Pancasila sendiri berasal dari nilai-nilai hidup yang sejak lama dianut oleh masyarakat Indonesia. Konsep-konsep kunci dalam Pancasila bersifat filosofis, semuanya merupakan ekspresi fitrah manusia (Fauzi, 2020). Fitrah adalah apa yang seharusnya dimiliki, sering kali dimaknai sebagai utopia. Supaya nilai-nilai ini bisa terwujud, Pancasila harus bersifat dinamis, ia perlu terus menerus diadakan perubahan baik secara konseptual maupun operasional. Pancasila harus dijabarkan secara rasional dan kritis untuk menciptakan iklim kehidupan yang bebas dan rasional. Sebagai ideologi, ia tidak boleh terhambat, harus selalu mampu memberi pedoman, inspirasi, dan dukungan bagi masyarakat untuk mengembangkan bangsa (Eddy, 2018).

Pancasila telah ditafsirkan secara beragam dalam banyak penelitian. Penafsiran Pancasila dilihat berdasarkan zaman menunjukkan bagaimana Presiden Soekarno menggunakan paradigma USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian bangsa Indonesia), pemerintah orde baru meluncurkan program P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni, dan reinterpretasi Pancasila pada era reformasi menyesuaikan perkembangan zaman (Apriliani & Dewi, 2021). Hajri, Idris, dan Riantono (2019) juga menyorot kesalahan penafsiran Pancasila akibat tidak menggunakan metode yang tepat, serta menekankan pentingnya kesesuaian tafsir Pancasila dengan ajaran agama. Dinamika penerapan Pancasila menunjukkan bagaimana nilai-nilainya direduksi sehingga maknanya menjadi statis. Kenyataan kini semakin menjadikan Pancasila sebagai utopia bagi bangsa Indonesia sendiri (Sukoco, 2017). Usaha revitalisasi Pancasila untuk menghidupkan kembali Pancasila dalam kehidupan sehari-hari diharap mampu mengatasi kurangnya penghayatan

dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sekaligus menjawab tantangan globalisasi (Fitriasari, 2020).

Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) seringkali ditempatkan sebagai acuan normatif karena adanya keyakinan bahwa IPTEK dapat mengancam kemanusiaan, kebudayaan, dan identitas nasional (Setyorini, 2018; Yanzi, *et al.*, 2019). Telah banyak penelitian serupa yang menyorot pentingnya orientasi Pancasila dalam pengembangan IPTEK. Akan tetapi, Megawati justru menyorot pentingnya hal tersebut atas dasar ekonomi di akhir pidato pengukuhan.

Sebagaimana perkembangannya saat ini, sistem ekonomi semakin bergerak ke kiri. Proteksi tenaga kerja semakin berkurang seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini mengesankan bahwa nilai praksis Pancasila direduksi supaya sesuai dengan sistem kapitalisme. Para intelektual diarahkan untuk melayani kepentingan negara, yang mana berbanding terbalik dengan semangat Foucault untuk memperjuangkan kelompok yang tertindas dalam struktur sosial dan negara. Adanya label Pancasila seolah-olah memaksa para peneliti agar melakukan penelitian yang sifatnya membangun alih-alih mencerahkan. Pancasila yang secara kolektif tafsirannya bergantung pada rezim penguasa berpotensi membatasi upaya representasi kelompok marjinal dalam dunia akademik, memungkinkan dilakukan pembatasan formal pada ruang gerak akademik seperti pelarangan diskusi maupun penangkapan aktivis dalam kegiatan akademisnya.

SIMPULAN

Wacana kepemimpinan dibangun oleh Megawati Soekarnoputri melalui karya ilmiah dan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Tidak Tetap di Universitas Pertahanan Kedua teks tersebut harus dipahami secara berurutan untuk memberi konteks mengenai wacana apa yang sedang ia bangun. Dalam karya ilmiah, Megawati mulai membangun wacana melalui presentasi hasil kerjanya ketika

menyelesaikan krisis multidimensi pada periode 2001-2004. Kesimpulan yang muncul adalah kepemimpinan Megawati merupakan faktor penentu keberhasilan Indonesia keluar dari masa krisis tersebut. Wacana berlanjut dalam pidato pengukuhan yang diucapkannya pada 11 Januari 2021, di mana ia membahas mengenai model ideal kepemimpinan strategis di Indonesia. Gagasan “kepemimpinan strategis berlandaskan Pancasila” muncul untuk menghubungkan dengan konteks Indonesia. Di sini ia banyak menyinggung persoalan-persoalan bangsa kekinian dan menawarkan Pancasila sebagai solusi untuk mengatasi disrupsi yang sedang terjadi. Ia kemudian mengapresiasi presiden Joko Widodo yang membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang berlandaskan Pancasila.

Berdasarkan analisis wacana kritis yang dilakukan, wacana yang dibangun Megawati bertujuan supaya masyarakat memberi pengakuan atas kontribusi dirinya bagi Indonesia sekaligus menjustifikasi eksploitasi Pancasila sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan kelompoknya. Komunikasi digunakan untuk mempengaruhi, bukan untuk mencapai kesepakatan bersama. Upaya strategis yang dilakukan tidak dibarengi dengan tindakan komunikatif untuk membangun iklim demokrasi yang lebih terbuka. Wacana ini menempatkan rakyat sebagai subjek yang pasif, menghiraukan kontribusi mereka dalam diskursus politik selain sebagai pemilih dan meminggirkan peran mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Pengetahuan yang ingin dibangun oleh wacana kepemimpinan ini adalah Pancasila sebagai landasan bagi setiap aktivitas sosial. Megawati sedang membangun persepsi kepada masyarakat bahwa kepemimpinan berbasis Pancasila adalah model kepemimpinan terbaik, dan dirinya telah melaksanakan itu. Pancasila dalam hal ini direduksi nilai praksisnya menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan. Nilai-nilai universal yang terkandung di dalam Pancasila digunakan untuk melayani kepentingan negara, menjustifikasi tindakan represif dan pengecualian yang dilakukan oleh negara atas kelompok-

kelompok marjinal. Pancasila secara praksis seharusnya mencerahkan setiap warga negara, namun apa yang tertera dalam wacana ini justru semakin mengekang ruang gerak masyarakat.

Dampak dari adanya wacana kepemimpinan ini adalah semakin menguatnya kontrol negara terhadap warga, terutama komunitas ilmiah. Pengangkatan Megawati sebagai guru besar bertujuan untuk memberi legitimasi atas kontrol negara kepada komunitas ilmiah. Komunitas ilmiah disasar karena dianggap sebagai komunitas yang mengontrol pengetahuan masyarakat lewat kegiatan belajar-mengajar dan penelitian. Masyarakat dalam hal ini dipaksa untuk selalu melayani kepentingan negara. Mengingat kepentingan negara ditentukan oleh rezim yang berkuasa, maka kelompok Megawati turut andil menentukan apa yang menjadi kepentingan negara. Momentum pemilihan umum yang akan berlangsung pada tahun 2024 menguatkan dugaan bahwa wacana kepemimpinan sengaja dibangun oleh Megawati untuk memudahkan kelompoknya agar dapat kembali berkuasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Bacchi, C., & Bonham, J. (2014). Reclaiming discursive practices as an analytic focus: Political implications. *Foucault Studies*, (17), 173–192.
<https://doi.org/10.22439/fs.v0i17.4298>
- Chilton, P. (2004). Analysing Political Discourse: Theory and practice. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. New York: Routledge.
- CNN Indonesia. (2021). Obral Gelar Kehormatan Dianggap Kotori Proses Akademik. Retrieved June 14, 2021, from CNN Indonesia website:
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210609110722-20-652044/obral-gelar-kehormatan-dianggap-kotori-proses-akademik>
- Davies, B. J., & Davies, B. (2004). Strategic leadership. *School Leadership and Management*, 24(1), 29–38.
<https://doi.org/10.1080/1363243042000172804>
- Fairclough, N. (2006). Semiosis, ideology, and

- mediation: A dialectical view. In I. Lassen, J. Strunck, & T. Vestergaard (Eds.), *Mediating Ideology in Text and Image: Ten critical studies* (pp. 19–36). Amsterdam.
- Foucault, Michael, & Deleuze, G. (1977). *Intellectuals and Power*. In *Language, Counter-Memory, Practice: Selected Essays and Interviews* (Bouchard,). Ithaca: Cornell University Press.
<https://doi.org/10.1080/00131726909339788>
- Foucault, Michel. (1988). *Politics, Philosophy, Culture: Interviews and Other Writings 1977-1984*. In *Politics, Philosophy, Culture*. New York: Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203760031>
- Fuchs, C. (2016). *Critical Theory of Communication: New Readings of Lukács, Adorno, Marcuse, Honneth and Habermas in the Age of the Internet*. London.
- Habermas, Jürgen. (1979). *Communication and the Evolution of Society*. Boston: Beacon Press.
- Habermas, Jürgen. (2006). Political communication in media society: Does democracy still enjoy an epistemic dimension? The impact of normative theory on empirical research. *Communication Theory*, 16(4), 411–426.
<https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2006.00280.x>
- Hakim, S. (2021). Guru Besar IPB paparkan rencana gelar Profesor Kehormatan Megawati. *ANTARA*. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/2201358/guru-besar-ipb-paparkan-rencana-gelar-profesor-kehormatan-megawati>
- Haripin, M. (2019). Relasi Sipil-Militer dan Persepsi Ancaman di Indonesia Pasca Orde Baru. In S. Haris (Ed.), *Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi* (pp. 310–410). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hasfi, N., Santosa, H. P., & Lukmantoro, T. (2015). Twitter dan Pemilu di Indonesia: Propaganda di Ruang Publik Maya. In I. P. Hadi (Ed.), *Information and Communication Technology, dan Literasi Media Digital* (pp. 23–38). Yogyakarta: ASPIKOM.
- Johnson, J. (1991). Habermas on Strategic and Communicative Action. *Political Theory*, 9(2), 181–201.
- Junaedi, D. (2018). Hubungan Antara Utang Luar Negeri Dengan Perekonomian Dan Kemiskinan: Komparasi Antarezim Pemerintahan. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 563–587. Retrieved from <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/154>
- Ma'arif, S. (2019). NEGARA DI SEKTOR BISNIS PASCA ORDE BARU (Studi Komparasi Tiga Masa Pemerintahan). *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 5(1), 45–58.
- Mudhoffir, A. M. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 18(1).
<https://doi.org/10.7454/mjs.v18i1.3734>
- Munfarida, E. (2014). Analisis Wacana Kritis Dalam Perspektif Norman Fairclough. *Komunika*, 8(1), 1–19.
- Muzir, R. (2015). Tertawalah Sebelum Tertawa Dilarang Dalam Politik: Membayangkan Indonesia lewat Meme Politik Pilpres. *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 3(2), 137–156.
- Obama, B. (2016). United States health care reform: Progress to date and next steps. *JAMA - Journal of the American Medical Association*, 316(5), 525–532.
<https://doi.org/10.1001/jama.2016.9797>
- Pangestu, R. R. (2021). Guru Besar UNJ Ingin Megawati Jadi Inspirasi Dunia Internasional, Puji Karya. *Pikiran Rakyat*. Retrieved from <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012039566/guru-besar-unj-ingin-megawati-jadi-inspirasi-dunia-internasional-puji-karya-ilmiahnya>
- Rafyq, P. (2021). Rektor Universitas Negeri Padang Nilai Megawati Pantas Dapat Gelar Profesor. Retrieved June 14, 2021, from Kumparan website: <https://kumparan.com/kumparannews/rektor-universitas-negeri-padang-nilai-megawati-pantas-dapat-gelar-profesor-1vulhJY9Vot>
- Reunanen, E., & Kunelius, R. (2019). The Transformation of Communicative Power Into Political Power. *Communication Theory*, 1–20. <https://doi.org/10.1093/ccc/qtz011>
- Saidi, A. (2015). The Classification Of Habermas Epistemology And Its Implication Toward Social-Cultural. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 17(2), 111–128.
- Setyorini, I. (2018). Urgensi Penegasan Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Iptek. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 4(02), 213–222.
<https://doi.org/10.32699/syariat.v4i02.1178>

Soekarnoputri, D. (2021). Kepemimpinan Presiden Megawati Pada Era Krisis Multidimensi , 2001-2004. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 11(1), 49–66.

Thoiyibi, M. (2008). *Kebijakan Pemerintahan Megawati Soekarnoputri Tentang Terorisme*. Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Yanzi, H., Adha, M. M., Hidayat, O. T., & Putri, D. S. (2019). Urgensi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Pengembangan IPTEK Untuk Merespon Revolusi Industri 4.0. *Repository.Lppm.Unila.Ac.Id*.